

Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Konten Terkonfirmasi Hoaks pada Situs Web Komdigi (Violations of the Cooperative Principle in Hoax Content Verified by the Ministry of Communication and Digital Affairs (Komdigi))

Dini Febriani¹, Dhesti Qorita Ayun¹, Puteri Syanti Dewi Islami¹, Sumarlam²

¹Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.

²Program Studi S2 Ilmu Linguistik, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.

Corresponding Author: febrianidini852@gmail.com

Article history:

Received

04-06-2026

Revised

14-07-2026

Accepted

15-07-2026

Keywords:

cooperative principle;
forensic linguistic; hoax;
maxim violation;
pragmatic

Kata kunci:

hoaks; linguistik forensik;
pelanggaran maksim;
pragmatik; prinsip kerja
sama

This is an open-access
article under the CC BY SA
license.



Abstract: This study examines violations of Grice's Cooperative Principle in three pieces of content confirmed as hoaxes on the Komdigi website in its May 8, 2026, edition. The study employs a qualitative method with a pragmatic approach. Data collection was conducted through observation and note-taking techniques on the transcriptions of the three hoax content pieces, while data analysis involved identifying and classifying violations of the four maxims of the Cooperative Principles. The results of the study found a total of 16 violations spread across the four maxims: the maxim of quantity was the most frequently violated with six violations, followed by the maxim of quality with four violations, and the maxims of relevance and manner with three violations each. The hoax content regarding foreign ship tariffs in the Malacca Strait recorded the most violations with seven, followed by the TB vaccine hoax with five violations, and the Donald Trump video hoax with four violations. This study concludes that violations of the principle of cooperation in hoax content constitute a deliberate linguistic strategy to manipulate information, exploit the audience's emotions, and sway public opinion without support from verifiable facts.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pelanggaran prinsip kerja sama Grice dalam tiga konten yang telah terkonfirmasi hoaks pada situs web Komdigi edisi 8 Mei 2026. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pragmatik. Pengumpulan data dilakukan melalui metode simak dan teknik catat terhadap transkripsi teks ketiga konten hoaks, sedangkan analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan pelanggaran keempat maksim prinsip kerja sama. Hasil penelitian menemukan total 16 pelanggaran yang tersebar pada empat maksim, maksim kuantitas menjadi yang paling banyak dilanggar dengan enam pelanggaran, diikuti maksim kualitas dengan empat pelanggaran, serta maksim relevansi dan maksim cara masing-masing tiga pelanggaran. Konten hoaks tarif kapal asing di Selat Malaka mencatatkan pelanggaran terbanyak dengan tujuh pelanggaran, disusul hoaks vaksin TBC dengan lima pelanggaran, dan hoaks video Donald Trump dengan empat pelanggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelanggaran prinsip kerja sama dalam konten hoaks merupakan strategi kebahasaan yang disengaja untuk memanipulasi informasi, mengeksploitasi emosi audiens, serta menggiring opini publik tanpa dukungan fakta yang dapat diverifikasi.

Citation: Febriani, D., Ayun, D. Q., Islami, P. S. D., & Sumarlam. (2026). Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Konten Terkonfirmasi Hoaks pada Situs Web Komdigi. *Translation and Linguistics (Transling)*, 6(2), 185-202. <https://doi.org/10.20961/transling.v6i2.112680>

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era digital telah mendorong arus penyebaran informasi yang sangat cepat, terutama melalui media daring dan situs web resmi pemerintah (Al Affan, 2026). Salah satu platform yang berperan dalam penanganan berita bohong sekaligus klarifikasi informasi di Indonesia adalah situs web Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Namun, tingginya intensitas distribusi informasi juga diiringi dengan maraknya penyebaran hoaks yang dapat menyesatkan masyarakat (Rahmawati, 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak semua informasi yang beredar, bahkan yang berkaitan dengan klarifikasi hoaks, sepenuhnya dipahami secara tepat oleh masyarakat, karena adanya faktor kebahasaan yang turut memengaruhi interpretasi makna (Rohim & Alimudin, 2026).

Kondisi tersebut menempatkan bahasa sebagai objek kajian yang krusial dalam upaya memahami dan menangkal penyebaran hoaks. Dalam konteks linguistik forensik, bahasa tidak lagi dipandang sekadar sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai bukti yang dapat dianalisis untuk mengungkap maksud, manipulasi, dan strategi komunikasi tertentu. Penyebaran hoaks sering kali memanfaatkan struktur bahasa yang ambigu, tidak lengkap, atau menyesatkan untuk memengaruhi persepsi pembaca (Mahyoob dkk., 2021). Hal ini memperlihatkan bahwa aspek pragmatik, khususnya prinsip kerja sama dalam komunikasi, memiliki peran penting dalam memahami bagaimana hoaks dapat diterima sebagai informasi yang tampak benar (Igwebuike & Chimuanya, 2021; Lewandowsky & van der Linden, 2021).

Linguistik forensik merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji penggunaan bahasa dalam konteks hukum dan tindak kriminal (Olsson, 2004; Subyantoro, 2017). Dalam kajian ini, bahasa tidak hanya dipahami sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai bukti linguistik yang dapat dianalisis untuk mengungkap maksud, identitas penutur, serta bentuk manipulasi tertentu dalam suatu teks, foto, dan video yang marak disebar di media daring (Sholihatin, 2019). Hoaks merupakan informasi palsu atau menyesatkan yang disebar seolah-olah benar untuk memengaruhi opini publik atau menciptakan kepanikan sosial (Nasrullah, 2015). Konten hoaks umumnya menggunakan bahasa persuasif, emosional, dan provokatif agar dapat menarik perhatian pembaca. Penggunaan judul sensasional, informasi yang dilebih-lebihkan, serta diksi yang menggiring opini tertentu merupakan strategi yang sering ditemukan dalam konten hoaks (Ubaidillah, 2024).

Dalam konteks pragmatik, analisis terhadap konten hoaks tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip kerja sama (*cooperative principle*), yakni prinsip yang mengatur bagaimana penutur seharusnya berkontribusi secara kooperatif dalam suatu percakapan agar komunikasi berjalan efektif dan bermakna (Grice, 1975). Ketidaksesuaian antara informasi yang disampaikan dalam konten hoaks dengan fakta yang sebenarnya mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap prinsip tersebut, sehingga kajian ini menjadi relevan untuk mengungkap bentuk-bentuk penyimpangan bahasa yang digunakan dalam penyebaran hoaks (Panjaitan dkk., 2026).

Penelitian linguistik forensik tentang hoaks telah dilakukan, diantaranya oleh Handayani, et al. (2021) yang menemukan bentuk hoaks berupa misinformasi dan

disinformasi selama pandemi COVID-19. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pilihan kata, bentuk kalimat, serta konteks isi pesan dapat menjadi penanda kebohongan. Arianto (2021) membagi berita dugaan hoaks COVID-19 di media sosial menjadi hoaks berpotensi pidana, tidak berdampak hukum, dan tidak mengandung hoaks maupun pidana. Dalam kajian pragmatik, Halid (2022) meneliti tindak tutur yang mengandung hinaan, fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Hasilnya menunjukkan adanya dugaan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Utami, dkk. (2024) mengkaji kasus pencemaran nama baik oleh Marissya Icha terhadap Medina Zein dengan menggunakan teori pragmatik serta semantik gramatikal dan leksikal. Penelitian lain dilakukan Jannah, dkk. (2024) yang menganalisis tindak tutur dalam berita acara pemeriksaan dan fakta kriminal di dalamnya. Hasilnya ditemukan tindak tutur verdikatif, direktif, dan komisif serta fakta kriminal berupa penipuan dan penggelapan dana. Putri, dkk. (2025) mengkaji ciri linguistik hoaks pada pesan "Petrus" melalui analisis pragmatik, semantik, wacana, sintaksis, dan leksikal. Hasilnya menunjukkan bahwa pesan tersebut merupakan hoaks disinformasi yang ditandai penggunaan kata emosional, tanda seru berlebihan, huruf kapital penuh, dan klaim otoritas palsu.

Sementara itu, dalam kajian prinsip kerja sama, Sari, dkk. (2025) menganalisis pola implikatur dan praanggapan pada hoaks bertema vaksin dan menemukan bahwa pelanggaran maksim kualitas paling dominan digunakan untuk membangun narasi sindiran, provokasi emosional, dan konspiratif yang memengaruhi persepsi pembaca. Selain itu, Adelawati & Arimi (2025) membahas tindak tutur tidak literal dalam kasus Lina Mukherjee terkait pelanggaran UU ITE, sedangkan Djelema, dkk. (2025) mengkaji ujaran kebencian pada kasus Yai Mim dan Sahara dengan analisis pragmatik serta leksikal-semantik. Adapun Panjaitan, dkk. (2026) menginterpretasi kasus viral tuduhan hoaks terhadap pedagang es gabus melalui pendekatan pragmatik, dan menunjukkan bahwa penerapan prinsip kerja sama Grice (maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara). Terakhir, Sabrina, dkk. (2026) mengkaji kegagalan *felicity conditions* dan pelanggaran maksim Grice dalam tuturan fitnah aparat pada kasus yang sama, dan menemukan bahwa tuduhan tanpa bukti ilmiah tersebut melanggar maksim kualitas dan relevansi sehingga menimbulkan implikatur fitnah yang berdampak pada stigmatisasi sosial-ekonomi korban.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas hoaks dari segi sosial, politik, dan teknologi, kajian yang secara spesifik mengaitkan aspek linguistik terutama pelanggaran prinsip kerja sama masih relatif terbatas. Dalam penelusuran di beberapa laman situs web, konten hoaks sering kali disusun dengan melanggar maksim-maksim komunikasi untuk menciptakan efek tertentu, seperti melebih-lebihkan informasi, menyembunyikan fakta, atau menyampaikan pesan yang tidak relevan dengan konteks. Adapun perbedaan lainnya terdapat pada objek dan pendekatan analisis yang digunakan yaitu konten hoaks di situs web Komdigi dengan analisis pragmatik. Penelitian ini difokuskan pada analisis pelanggaran prinsip kerja sama pada konten yang telah diklarifikasi hoaks oleh pihak Komdigi, bukan pada klasifikasi jenis hoaks atau aspek hukum secara langsung. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

bagaimana pelanggaran prinsip kerja sama dalam teks atau konten yang diklarifikasi hoaks pada situs web komdigi.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelanggaran prinsip kerja sama pada konten yang telah terkonfirmasi hoaks pada situs web komdigi dengan menggunakan perspektif pragmatik, khususnya prinsip kerja sama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam kajian linguistik forensik, khususnya dalam analisis pragmatik yang berkaitan dengan fenomena hoaks di media digital, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara bahasa, makna, dan manipulasi informasi.

Penelitian ini menggunakan landasan teori pragmatik. Pragmatik merupakan cabang linguistik yang mempelajari makna tuturan berdasarkan konteks penggunaannya dalam komunikasi (Yule, 1996). Dalam kajian linguistik forensik, pragmatik menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis penggunaan bahasa termasuk pada konten yang berkaitan dengan penyebaran hoaks sebagai bukti linguistik. Selanjutnya, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip kerja sama (*cooperative principle*) yang dikemukakan oleh Paul Grice. Menurut Grice (1975), komunikasi yang efektif terjadi apabila penutur dan mitra tutur bekerja sama dalam proses penyampaian informasi. Prinsip kerja sama tersebut diwujudkan melalui empat maksim percakapan, yaitu maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara. Maksim kuantitas berkaitan dengan pemberian informasi secukupnya, maksim kualitas berkaitan dengan kebenaran informasi, maksim relevansi menekankan keterkaitan informasi dengan konteks pembicaraan, sedangkan maksim cara menekankan kejelasan dan ketidaksamaran tuturan (Grice, 1979). Dalam konteks penyebaran hoaks, pelanggaran terhadap maksim-maksim tersebut sering digunakan untuk memanipulasi informasi dan memengaruhi persepsi pembaca.

Teori pragmatik dan prinsip kerja sama Grice dipilih karena sesuai dengan fenomena kebahasaan yang dikaji dalam penelitian ini, yakni konten yang telah terkonfirmasi hoaks pada situs web Komdigi. Konten hoaks ini tidak hanya dipahami dari benar salahnya informasi, melainkan juga dari cara informasi tersebut disampaikan dalam konteks komunikasi. Oleh sebab itu, pragmatik digunakan karena mampu mengkaji keterkaitan antara tuturan, konteks, serta makna yang muncul melalui penggunaan bahasa. Dari berbagai kajian pragmatik, teori prinsip kerja sama Grice dipilih karena dapat memberikan dasar yang jelas untuk mengidentifikasi bentuk penyimpangan komunikasi melalui pelanggaran maksim. Teori ini dianggap lebih sesuai daripada teori pragmatik lainnya yang berfokus pada fungsi tuturan (teori tindak tutur) atau strategi menjaga hubungan sosial penutur (teori kesantunan). Pemilihan ini juga disesuaikan dengan tujuan penelitian yang berfokus untuk mendeskripsikan bentuk pelanggaran prinsip kerja sama yang ditemukan dalam konten yang terkonfirmasi hoaks. Dengan demikian, teori prinsip kerja sama Grice menjadi landasan teori yang paling relevan untuk menjelaskan fenomena yang menjadi objek penelitian sekaligus menjawab tujuan penelitian.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena kebahasaan berupa pelanggaran prinsip kerja sama dalam konten klarifikasi hoaks pada situs web Komdigi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna, konteks serta penggunaan bahasa dalam teks, bukan untuk mengukur data secara kuantitatif (Sugiyono, 2019). Data penelitian yang digunakan berupa penggalan transkripsi teks dalam konten yang telah terklarifikasi hoaks sekaligus dipublikasikan melalui situs web resmi Komdigi, khususnya yang diunggah pada tanggal 8 Mei 2026 dan di dalamnya terdapat pelanggaran maksim beserta konteksnya. Sumber data penelitian ini berupa tiga dokumen tertulis yang memuat informasi klarifikasi terhadap berita hoaks. Adapun ketiga sumber data tersebut adalah: (1) [Hoaks] Vaksin TBC Mengandung *Nanobots*, yang diunggah pada tanggal 8 Mei 2026; (2) [Hoaks] Indonesia Bakal Pungut Tarif ke Kapal Asing yang Melintas di Selat Malaka, yang diunggah pada tanggal 8 Mei 2026; (3) [Hoaks] Transkripsi dari Video Donald Trump Kibarkan Bendera Putih, yang diunggah pada tanggal 8 Mei 2026.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dan teknik catat karena bertujuan untuk menyimak penggunaan bahasa, baik secara lisan maupun tulis (Sudaryanto, 2015). Dalam penelitian ini, teknik simak digunakan untuk mengamati penggunaan bahasa dalam teks klarifikasi hoaks pada situs web Komdigi, sedangkan teknik catat digunakan untuk mendokumentasikan data yang mengandung indikasi pelanggaran prinsip kerja sama. Proses pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan penelusuran, pemilihan, dan pengarsipan teks yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang dibantu dengan instrumen pendukung berupa tabel klasifikasi data untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran prinsip kerja sama (Sugiyono, 2019).

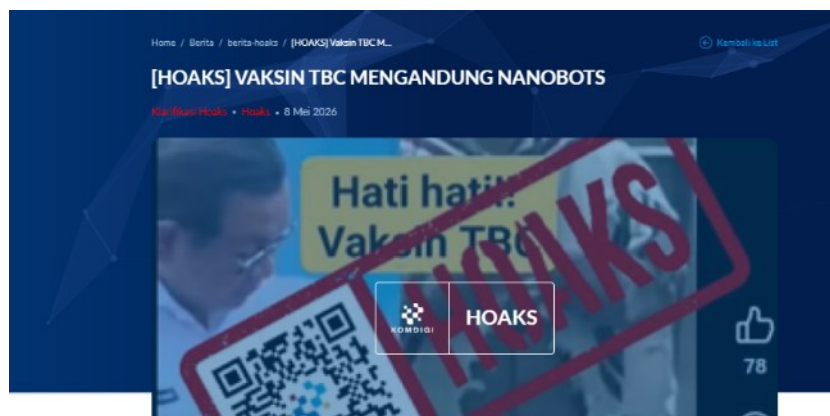
Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan pragmatik, khususnya prinsip kerja sama yang dikemukakan oleh Grice (1975). Analisis difokuskan pada identifikasi dan klasifikasi pelanggaran maksim yang meliputi maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara, serta penafsiran implikasi makna yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut terhadap pemahaman pembaca. Tahapan analisis dilakukan secara sistematis melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan deskripsi yang komprehensif mengenai bentuk pelanggaran prinsip kerja sama dalam teks klarifikasi hoaks.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penemuan data dan analisis data, ditemukan pelanggaran prinsip kerja sama dalam 3 kasus hoaks yang telah dikonfirmasi di situs web Komdigi. Pelanggaran prinsip kerja sama pada penelitian ini berkaitan dengan 4 maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Data yang dianalisis bersumber dari situs situs web Komdigi yang dipublikasikan pada tanggal 8 Mei 2026. Berikut ini adalah penyajian data dan hasil analisis pelanggaran prinsip kerja sama yang ditemukan:

3.1 Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Konten Hoaks Vaksin TBC Mengandung Nanobots

Gambar 1. Konten Hoaks Vaksin TBC



Sumber: Situs Web Komdigi (08/05/2026).

Konteks: Seseorang dengan akun Facebook bernama Edward Fautngil mengunggah video berdurasi 1 menit 29 detik. Dalam video unggahan ditampilkan beberapa potongan video yang disatukan, seperti yang terlihat dalam Gambar 1. Video utama memperlihatkan seorang pendeta laki-laki berambut putih seolah-olah tengah berbicara terkait vaksin TBC tersebut, dan di bagian bawah ditambahkan video lain yang menampilkan gambar perempuan berhijab.

Transkripsi tuturan: *"Sekarang kan ada vaksin TBC, sodara. Lah kok tiba-tiba di RW ini kok ada penyakit TBC? Aneh nggak? Pernah nggak sodara berpikir, eh keluar penyakit TBC? Katanya, katanya, sodara. Padahal itu supaya vaksinnya bisa dimasukkan pada orang. Saya katakan, jangan mau vaksin TBC. Dalamnya itu bukan obat TBC, bukan, sodara. Ada nanobotnya di dalam. Anak-anak sekolah sekarang sudah mulai diberitahu, siap-siap untuk menerima vaksin TBC. Kemudian yang di luar negeri, orang divaksin bisa berubah jadi autis. Bayangkan, sodara. Orang dewasa divaksin jadi autis. Wong negara-negara lain menolak kok Indonesia dijadikan kelinci percobaan kok mau. Terang-terangan lho. Bill Gates mengatakan Indonesia menjadi kelinci percobaan. Maka saya dalam grup siap-siap untuk terima vaksin, menyehatkan, biar cepet, cepet modar, sodara."* Transkrip bersumber dari akun tirta.id [<https://tirta.id/tidak-benar-vaksin-tbc-mengandung-nanobots-hvHM>].

Pelanggaran Maksim Kuantitas

Pada transkripsi tuturan di atas, ditemukan pelanggaran maksim kuantitas, yaitu ketika tuturan memberi informasi yang terlalu berlebihan kepada pendengar.

- (1) *"Katanya, katanya, sodara,"*
- (2) *"Dalamnya itu bukan obat TBC, bukan, sodara. Ada nanobotnya di dalam,"*
*"Wong negara-negara lain menolak kok **Indonesia dijadikan kelinci percobaan kok mau.**"*

Tuturan-tuturan dalam data (1) dan (2) di atas memuat pengulangan kosakata seperti "**Katanya, katanya**", penambahan detail provokatif seperti yang tertera pada data (2), dan generalisasi yang tidak diperlukan untuk menyampaikan pokok gagasan. Penutur tidak lagi memberi informasi secukupnya, melainkan menambahkan detail-detail yang bersifat hiperbola untuk memengaruhi pendengar atau mitra tutur. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran maksim kuantitas oleh penutur.

Pelanggaran Maksim Kualitas

Dalam transkripsi tuturan di atas, maksim kualitas dilanggar ketika penutur menyampaikan hal yang tidak benar, tidak didukung bukti, atau diduga palsu.

- (3) *"Dalamnya itu bukan obat TBC, bukan, sodara. Ada nanobotnya di dalam,"*
"orang divaksin bisa berubah jadi autis,"
"Orang dewasa divaksin jadi autis,"
"Bill Gates mengatakan Indonesia menjadi kelinci percobaan."

Kalimat-kalimat di atas berbentuk asertif, yakni klaim faktual, tetapi disampaikan tanpa dasar dukungan fakta yang jelas dan berisi proposisi yang diragukan validitasnya. Hal ini merupakan pelanggaran maksim kualitas karena penutur mengafirmasi atau mengonfirmasikan sesuatu seolah-olah benar padahal tidak didukung dengan bukti yang akurat, jelas, dan memadai.

Pelanggaran Maksim Relevansi

Pada transkripsi tuturan ada pelanggaran maksim relevansi ketika tuturan melompat dari satu topik ke topik lain tanpa hubungan argumen yang memadai.

- (4) *"Sekarang kan ada **vaksin TBC**, sodara. Lah kok tiba-tiba **di RW ini kok ada penyakit TBC?** Aneh nggak? Pernah nggak sodara berpikir, eh keluar penyakit TBC?", "Ada **nanobotnya** di dalam.", "Kemudian yang di luar negeri, orang divaksin bisa berubah jadi **autis.**", "**Bill Gates** mengatakan **Indonesia menjadi kelinci percobaan.**"*

Pada data (4) alur informasi bergerak dari "**vaksin TBC**" ke "**di RW ini ada penyakit TBC**", lalu ke "**nanobot**", lalu ke "**autis**", lalu ke "**Bill Gates**", lalu ke "**Indonesia menjadi kelinci percobaan.**" Pergeseran ini tidak membangun argumentasi yang koheren, melainkan menciptakan asosiasi-asosiasi yang longgar agar pendengar menerima kesimpulan tertentu. Dari sudut pandang prinsip kerja sama Grice, topik-topik itu tidak dijelaskan satu-persatu secara logis dan topiknya melompat dari satu topik ke topik lain tanpa penjelasan lanjut, sehingga tuturan menjadi tidak relevan dengan inti pembahasan kesehatan yang sedang diklaim.

Pelanggaran Maksim Cara

Dalam transkripsi tuturan di atas, pelanggaran maksim cara terjadi ketika tuturan disampaikan secara tidak jelas, tidak tertata, ambigu, atau bertele-tele.

(5) *“Katanya, katanya, sodara.”, “Terang-terangan lho.”, “cepat, cepat modar, sodara.”*

Dalam data (5) ini, pelanggaran tampak pada penggunaan repetisi *“katanya, katanya,”* penanda audiens *“sodara,”* seruan *“terang-terangan lho,”* dan frasa dramatis *“cepat, cepat modar.”* Gaya seperti ini tidak bertujuan menjernihkan informasi, melainkan membangun suasana panik dan sugestif. Secara gramatikal memang masih dapat dipahami, tetapi secara pragmatik tuturan tidak sistematis, tidak ringkas, dan tidak menyajikan hubungan antargagasan secara tertib.

Dari perspektif linguistik forensik, isi pesan digunakan untuk memengaruhi masyarakat. Jika dikaitkan dengan prinsip kerja sama Grice (1975), pola-pola kebahasaan tersebut dapat diidentifikasi sebagai bentuk pelanggaran terhadap beberapa maksim sekaligus. Penggunaan pernyataan yang disampaikan seolah-olah benar tanpa disertai bukti yang jelas merupakan pelanggaran terhadap maksim kualitas, karena penutur menyampaikan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, pengulangan kata dan kalimat yang berfungsi memperkuat pengaruh terhadap pendengar menunjukkan pelanggaran maksim kuantitas, sebab informasi yang disampaikan melampaui batas kebutuhan komunikasi yang wajar. Penyebutan tokoh terkenal seperti Bill Gates tanpa disertai rujukan atau konteks yang relevan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran maksim relevansi, karena kaitan antara tokoh tersebut dengan klaim yang disampaikan tidak dijelaskan secara proporsional, melainkan hanya digunakan untuk membangun kesan otoritatif dan meyakinkan.

Dalam kajian linguistik forensik, pola bahasa seperti ini sering dipahami sebagai strategi untuk membentuk kepercayaan dan memengaruhi opini publik tanpa memberikan data atau fakta yang dapat dibuktikan (Sari, dkk., 2025; Panjaitan, dkk., 2026). Dengan demikian, ketidaksesuaian antara maksud yang disampaikan dan prinsip kerja sama yang seharusnya dipatuhi menunjukkan bahwa bahasa tidak lagi digunakan untuk memberikan penjelasan yang objektif, tetapi lebih diarahkan untuk menggiring cara berpikir pendengar melalui pelanggaran maksim kualitas, kuantitas, dan relevansi secara bersamaan.

3.2 Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Kasus Hoaks Indonesia Bakal Pungut Tarif ke Kapal Asing yang Melintas di Selat Malaka

Gambar 2. Kasus Hoaks Indonesia Pungut Tarif ke Kapal Asing



Sumber: Situs Web Komdigi (08/05/2026).

Konteks: Beredar unggahan video di media sosial TikTok dari akun “kreatirmuda87” yang menampilkan sejumlah kapal perang. Video tersebut disertai narasi bahwa Indonesia akan mengenakan tarif atau “tol air” kepada kapal asing yang melintasi Selat Malaka. Video tersebut dinyatakan hoaks seperti yang terlihat pada Gambar 2. Dalam unggahan juga disebutkan bahwa Indonesia mengirim 12 kapal perang ke Selat Malaka sehingga negara tetangga “kebakaran jenggot”.

Transkripsi tuturan: *“Meniru IRGC di Selat Hormuz Indonesia mengirim 12 kapal perang ke Selat Malaka membuat negara tetangga kebakaran jenggot Indonesia akan mengenakan tarif tol air kepada kapal asing yang melintasi Selat Malaka”.*

Transkrip bersumber dari klarifikasi TurnBackHoax [<https://turnbackhoax.id/articles/34134-salah-indonesia-bakal-pungut-tarif-ke-kapal-asing-yang-melintas-di-selat-malaka>].

Pelanggaran Maksim Kuantitas

Pada transkripsi tuturan di atas, ditemukan pelanggaran maksim kuantitas, yaitu ketika tuturan memberi informasi yang terlalu berlebihan kepada pendengar.

(6) *“Indonesia mengirim 12 kapal perang ke Selat Malaka membuat negara tetangga **kebakaran jenggot**”*

(7) *“Indonesia akan mengenakan tarif **tol air** kepada kapal asing yang melintasi Selat Malaka”*

Tuturan pada data (6) dan (7) menunjukkan adanya penambahan unsur sensasional seperti frasa “**kebakaran jenggot**” dan “**tol air**” untuk memperbesar kesan ancaman atau ketegangan politik. Informasi tersebut disampaikan tanpa penjelasan rinci mengenai konteks asli video maupun status sebenarnya dari wacana tarif tersebut. Penutur tidak memberikan informasi secukupnya, melainkan menambahkan detail hiperbolis agar pesan tampak lebih dramatis dan menarik perhatian audiens. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran maksim kuantitas karena informasi yang diberikan tidak proporsional dan cenderung berlebihan.

Pelanggaran Maksim Kualitas

Dalam Transkripsi tuturan di atas, maksim kualitas dilanggar ketika penutur menyampaikan hal yang tidak benar, tidak didukung bukti, atau diduga palsu.

(8) *“Indonesia mengirim 12 kapal perang ke Selat Malaka”*

(9) *“Indonesia akan mengenakan tarif **tol air** kepada kapal asing yang melintasi Selat Malaka”*

Tuturan pada data (8) dan (9) berbentuk asertif atau pernyataan fakta, tetapi tidak didukung informasi yang benar. Faktanya, video yang digunakan merupakan dokumentasi latihan militer tahun 2024 di Karimunjawa, bukan pengiriman kapal perang untuk mengamankan pungutan tarif di Selat Malaka. Selain itu, pemerintah Indonesia

melalui Menteri Luar Negeri Sugiono telah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengenakan tarif di Selat Malaka karena bertentangan dengan ketentuan UNCLOS. Dengan demikian, tuturan tersebut melanggar maksim kualitas karena menyampaikan informasi yang menyesatkan dan tidak sesuai fakta.

Pelanggaran Maksim Relevansi

Pada transkripsi tuturan ada pelanggaran maksim relevansi ketika tuturan melompat dari satu topik ke topik lain tanpa hubungan argumen yang memadai.

(10) *"Meniru IRGC di Selat Hormuz"*

"Indonesia mengirim 12 kapal perang ke Selat Malaka"

(11) *"Membuat negara tetangga kebakaran jenggot"*

"Indonesia akan mengenakan tarif tol air"

Pada data (10) dan (11) penutur menghubungkan isu Iran di Selat Hormuz dengan latihan militer Indonesia di Karimunjawa dan kemudian menarik kesimpulan bahwa Indonesia akan menerapkan tarif di Selat Malaka. Hubungan antartopik tersebut tidak dijelaskan secara logis dan hanya membangun asosiasi yang bersifat sugestif. Penutur melompat dari isu geopolitik internasional ke isu militer dan ekonomi tanpa argumentasi yang koheren. Dalam perspektif prinsip kerja sama Grice, informasi yang disampaikan tidak relevan karena konteks asli video tidak berkaitan dengan kebijakan pungutan tarif kapal asing.

Pelanggaran Maksim Cara

Dalam transkripsi tuturan di atas, pelanggaran maksim cara terjadi ketika tuturan disampaikan secara tidak jelas, tidak tertata, ambigu, atau bertele-tele.

(12) *"Membuat negara tetangga **kebakaran jenggot**"*

*"Tarif **tol air**"*

Dalam data (12) penutur menggunakan ungkapan metaforis dan emosional seperti "**kebakaran jenggot**" untuk membangun kesan konflik atau kepanikan negara lain terhadap Indonesia. Selain itu, istilah "**tol air**" digunakan secara ambigu dan tidak memiliki penjelasan resmi dalam konteks hukum internasional pelayaran. Gaya bahasa seperti ini membuat informasi menjadi tidak jelas, tidak sistematis, dan lebih berorientasi pada efek emosional daripada penyampaian fakta. Secara pragmatik tuturan disusun untuk memancing reaksi audiens, bukan untuk memberikan penjelasan yang objektif dan terstruktur.

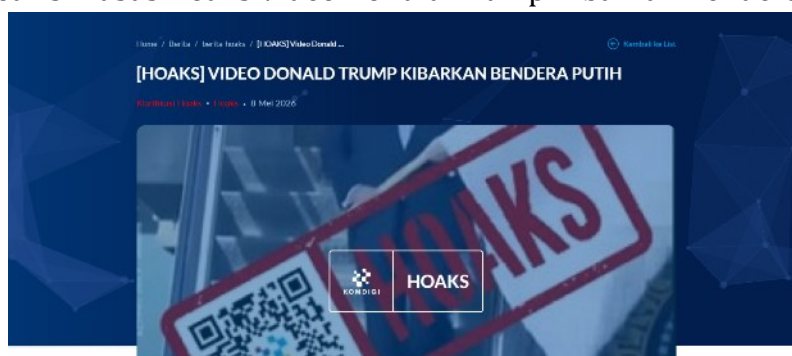
Dari perspektif linguistik forensik, isi pesan dalam video tersebut memperlihatkan penggunaan bahasa yang bersifat persuasif dan provokatif untuk memengaruhi opini publik. Penutur membangun narasi ancaman dan kekuatan negara dengan menghubungkan latihan militer, isu geopolitik internasional, dan kebijakan ekonomi secara tidak akurat. Selain itu, penggunaan istilah hiperbolis seperti "**kebakaran jenggot**" berfungsi memperkuat efek emosional terhadap pendengar. Dalam kajian linguistik forensik, pola bahasa seperti ini sering digunakan dalam konten hoaks untuk

menciptakan kesan seolah-olah informasi tersebut benar dan mendesak dipercaya, meskipun tidak disertai bukti yang valid dan dapat diverifikasi.

Fenomena ini dapat dijelaskan lebih lanjut melalui prinsip kerja sama (*cooperative principle*) Grice (1975), yang mensyaratkan komunikasi efektif melalui empat maksim: kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara. Tuturan dalam video yang dianalisis melanggar keempat maksim tersebut. Maksim kuantitas dilanggar karena informasi yang disampaikan tidak proporsional—penutur menambahkan narasi dan spekulasi yang berlebihan tanpa disertai data pendukung yang memadai, sehingga informasi yang diterima pendengar tidak utuh dan cenderung berat sebelah. Maksim kualitas dilanggar karena klaim disampaikan tanpa bukti valid dan menghubungkan fakta secara tidak akurat. Maksim relevansi dilanggar karena isu-isu yang tidak berkaitan langsung (latihan militer, geopolitik, kebijakan ekonomi) dijalin seolah membentuk satu sebab-akibat. Maksim cara dilanggar melalui ungkapan hiperbolis seperti **“kebakaran jenggot”** yang mengaburkan makna demi efek emosional. Pelanggaran terhadap keempat maksim ini menunjukkan bahwa tuturan tersebut tidak bertujuan menyampaikan informasi secara kooperatif dan transparan, melainkan menggiring opini publik melalui implikatur yang menyesatkan (*misleading implicature*) pola yang lazim ditemukan dalam wacana hoaks.

3.3 Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Kasus Hoaks Video Donald Trump Kibarkan Bendera Putih

Gambar 3. Kasus Hoaks Video Donuld Trump Kibarkan Bendera Putih



Sumber: Situs Web Komdigi (08/05/2026).

Konteks: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang memperlihatkan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat (AS) turun dari tangga pesawat sambil mengibarkan bendera putih. Setelah turun dari tangga, Trump tampak melemparkan bendera tersebut, kemudian bersujud di tanah. Unggahan video tersebut juga dilengkapi *caption*. Video tersebut memberi penjelasan hoaks seperti pada Gambar 3.

Transkripsi: *“Sebuah rekaman video yang memperlihatkan Trump mengibarkan bendera putih dan bersujud saat turun dari pesawat menjadi perbincangan hangat. Video ini muncul bersamaan dengan kabar bahwa Trump akhirnya menyetujui tuntutan Iran yang selama ini buntu di meja perundingan. Momen ini disebut-sebut sebagai simbol kemenangan besar bagi posisi tawar Iran di mata dunia. Kemenangan diplomatik nyata atau sekadar drama digital? Bagaimana menurut Anda?”*

Transkripsi bersumber dari website kompas.com
[<https://www.kompas.com/cekfakta/read/2026/05/07/100100582/-hoaks-video-donald-trump-mengibarkan-bendera-putih>].

Pelanggaran Maksim Kuantitas

Dalam transkripsi tersebut, ditemukan adanya pelanggaran maksim kuantitas di mana suatu tuturan tidak memberikan informasi secukupnya, baik terlalu berlebih maupun terlalu kurang pada pendengar.

(13) *"...Trump akhirnya menyetujui tuntutan Iran yang selama ini buntu di meja perundingan."*

(14) *"Momen ini disebut-sebut sebagai simbol kemenangan besar..."*

Informasi pada data (13) dan (14) tidak diberikan dengan secukupnya, melainkan kurang dan tidak lengkap. Penjelasan rinci pada data (13) mengenai apa tuntutan Iran, konteks perundingan, serta sumber atau kejelasan waktu kejadian tidak diberikan. Adapun pada data (14) digunakan frasa **"disebut-sebut"** yang menyiratkan anonim. Dengan kata lain, penjelasan rinci mengenai siapa atau sumber mana yang menyebutkannya tidak disampaikan. Kekurangan dan ketidaklengkapan ini menjadikan informasi yang disampaikan sulit diverifikasi kebenarannya dan kurang memadai untuk pemahaman utuh. Dengan demikian, data tersebut mengarah pada pelanggaran maksim kuantitas.

Pelanggaran Maksim Kualitas

Berikut pelanggaran maksim kualitas yang ditemukan dalam transkripsi di atas dengan ditandai ketika penutur menyampaikan suatu hal yang tidak benar, tanpa bukti, atau diduga palsu.

(15) *"...Trump mengibarkan bendera putih dan bersujud saat turun dari pesawat..."*

Pada data (15) disampaikan informasi tanpa adanya dukungan bukti yang jelas dan terverifikasi, seperti adanya penyebutan sumber video serta detail video resminya (misal mengenai tanggal dan lokasi kejadian). Informasi tersebut juga disajikan seolah-olah seperti fakta dengan deskripsi serta tampilan visualisasi yang meyakinkan. Faktanya, video yang digunakan sebagai tampilan visualisasi tersebut bukan merupakan video nyata, melainkan konten AI. Ketiadaan sumber, detail waktu dan lokasi kejadian, serta manipulasi video menyebabkan informasi tersebut patut untuk diragukan kebenarannya dan diduga palsu. Dengan demikian, data tersebut dipandang berpotensi menyesatkan dan mengarah pada pelanggaran maksim kualitas yang menuntut penutur menyampaikan hal yang benar dengan dukungan bukti.

Pelanggaran Maksim Cara

Pada transkripsi di atas, ditemukan adanya pelanggaran maksim cara yang terjadi ketika suatu tuturan disampaikan secara tidak jelas, ambigu, atau bertele-tele.

(16) *"Kemenangan diplomatik nyata atau sekadar drama digital?"*

Data (16) disampaikan secara tidak jelas dan ambigu. Frasa **drama digital** ambigu dan maknanya tidak jelas, apakah yang dimaksud adalah video yang beredar tersebut merupakan hasil rekayasa AI atau yang dimaksud adalah kejadian nyata tapi memang sengaja dibesar-besarkan secara digital atau lainnya. Kesan ambigu ini kemudian dapat memengaruhi interpretasi pembaca tanpa ada batasan makna yang jelas. Di sisi lain, pembuat narasi juga tidak langsung memberikan kesimpulan yang jelas dan sengaja membiarkan informasi tersebut menjadi kabur dengan penggunaan pertanyaan retorik tanpa memberikan klarifikasi kebenaran video tersebut.

Dalam perspektif linguistik forensik, selain penyampai informasi, video bernarasi mengenai Trump yang mengibarkan bendera merah putih tersebut juga digunakan untuk membentuk opini publik. Melalui penggunaan frasa anonim, kalimat tanpa kebenaran, serta pertanyaan retorik, narasi tersebut secara tidak langsung membentuk citra Trump yang lebih lemah dan Iran yang lebih unggul. Strategi kebahasaan yang digunakan ini tidak menyatakan kebenaran informasi secara tegas, tetapi membiarkan audiens pada interpretasinya sendiri. Dalam pragmatik, strategi tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Prinsip Kerja Sama Grice pada beberapa maksim. Pertama, maksim kuantitas dilanggar karena tidak memberikan informasi yang cukup. Kedua, maksim kualitas dilanggar karena informasi yang disampaikan tidak didukung bukti yang jelas. Ketiga, maksim cara dilanggar karena penyampaiannya ambigu. Dari pelanggaran beberapa maksim ini mengakibatkan terbukanya peluang berbagai interpretasi atau penafsiran bagi penerima informasi.

Dalam kajian linguistik forensik, analisis terhadap pelanggaran maksim penting dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana bahasa dimanfaatkan sebagai sarana memengaruhi persepsi, membangun opini, dan menyebarkan informasi bohong atau hoaks. Dengan demikian, narasi ini dapat dikategorikan hoaks yang digunakan untuk membentuk opini dan persepsi publik melalui informasi yang tidak sepenuhnya jelas dan terverifikasi kebenarannya.

3.4 Pola Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice dalam Konten Hoaks di Situs Web Komdigi

Hasil analisis data terhadap ketiga konten hoaks dari situs Komdigi yang dikaji menunjukkan pola pelanggaran prinsip kerja sama yang dapat dirangkum secara sistematis. Frekuensi pelanggaran prinsip kerja sama Grice yang mencakup maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara pada masing-masing konten hoaks dapat disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Tiga Konten Hoaks di Situs Komdigi

No	Konten Hoaks	Pelanggaran Prinsip Kerja Sama/Maksim				Jumlah	Persentase
		Kuan	Kual	Rele	Cara		
1	[Hoaks] Indonesia Bakal Pungut Tarif ke Kapal Asing yang Melintas di Selat Malaka	2	2	2	1	7	43,75%
2	[Hoaks] Vaksin TBC Mengandung <i>Nanobots</i>	2	1	1	1	5	31,25%
3	[Hoaks] Transkripsi dari Video Donald Trump Kibarkan Bendera Putih	2	1	-	1	4	25,00%
Total		6	4	3	3	16	100%

Keterangan:

Kuan = Maksim Kuantitas

Kual = Maksim Kualitas

Rele = Maksim Relevansi

Cara = Maksim Cara

Berdasarkan data pada Tabel 1, perbedaan jumlah pelanggaran pada ketiga konten hoaks ini berkaitan erat dengan tingkat kompleksitas narasi yang dibangun. Konten pertama menautkan beberapa isu sekaligus latihan militer, geopolitik internasional (isu iran di Selat Hormuz), dan kebijakan ekonomi (pungutan tarif) yang diperkuat dengan istilah hiperbolis seperti “**kebakaran jenggot**” dan “**tol air**”, sehingga keempat maksim dilanggar secara merata. Konten kedua, meskipun menggabungkan beberapa klaim (nanobot, autisme, otoritas Bill Gates), tetap berpusat pada satu isu utama yaitu ketakutan terhadap vaksinasi, sehingga pelanggarannya tetap mencakup keempat maksim namun dengan intensitas lebih rendah. Adapun konten ketiga berfokus pada satu peristiwa tunggal yang disampaikan secara tidak lengkap dan ambigu, tanpa menautkan isu-isu yang tidak berkaitan, sehingga jumlah pelanggarannya paling rendah dan tidak mencakup maksim relevansi. Pola ini memperlihatkan bahwa semakin kompleks dan semakin banyak isu yang ditautkan secara tidak logis dalam sebuah narasi hoaks, semakin tinggi pula kecenderungan pelanggaran terhadap keempat maksim secara bersamaan.

Maksim yang paling sering muncul adalah maksim kuantitas, dengan jumlah enam pelanggaran yang ditemukan pada ketiga konten hoaks. Maksim kuantitas mengatur bahwa penutur seharusnya memberikan informasi secukupnya, tidak lebih dan tidak kurang dari yang dibutuhkan; dalam konten hoaks, pelanggarannya berwujud penambahan detail berlebihan, pengulangan klaim yang melebihi-lebihkan atau sebaliknya, serta penghilangan informasi penting yang dapat membatalkan narasi yang

dibangun. Maksim kualitas menyusul dengan empat pelanggaran, sedangkan maksim relevansi dan cara masing-masing tercatat tiga pelanggaran.

Hasil analisis menunjukkan pola yang konsisten dengan karakteristik umum konten hoaks. Maksim kuantitas paling sering dilanggar karena strategi hoaks umumnya bergantung pada penambahan detail dramatis atau penghilangan informasi penting agar narasi tampak meyakinkan sekaligus sulit diverifikasi. Maksim kualitas menyusul karena, setelah informasi dibuat berlebihan atau tidak lengkap, penutur kemudian menegaskan seolah-olah benar tanpa dukungan bukti sehingga pelanggaran kualitas kerap muncul sebagai kelanjutan dari pelanggaran kuantitas. Adapun maksim relevansi dan cara paling jarang dilanggar karena keduanya baru muncul pada tahap penyusunan argumen yang lebih kompleks, yakni ketika penutur mulai menautkan isu-isu yang tidak berkaitan (relevansi) atau menyampaikan dengan bahasa ambigu dan emosional (cara). Dengan demikian, pelanggaran prinsip kerja sama dalam konten hoaks pada penelitian ini cenderung dimulai dengan manipulasi informasi, yang kemudian diperkuat melalui manipulasi keterkaitan topik serta gaya penyampaian.

Temuan ini memperkuat sekaligus memperkaya sejumlah penelitian terdahulu yang telah mengaitkan hoaks dengan pelanggaran prinsip kerja sama Grice. Dominasi maksim kualitas yang ditemukan Sari, dkk. (2025) pada hoaks bertema vaksin dengan penekanan pada narasi sindiran, provokasi emosional, dan konspiratif, sejalan dengan pola pada konten kedua dalam penelitian ini, yang juga bertema vaksinasi. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan maksim kuantitaslah yang paling dominan dilanggar, bukan kualitas, sehingga memberikan gambaran tambahan bahwa strategi manipulasi tidak selalu dimulai dari klaim yang tidak berdasar, melainkan bisa pula dimulai dari pengaturan jumlah informasi itu sendiri. Hasil ini juga selaras dengan temuan Panjaitan dkk. (2026) dan Sabrina dkk. (2026) yang sama-sama mengonfirmasi pelanggaran maksim kualitas dan relevansi sebagai penanda kunci hoaks yang berdampak pada stigmatisasi maupun implikatur fitnah, meski pada penelitian ini pelanggaran relevansi justru menempati posisi terendah bersama maksim cara. Perbedaan ini menunjukkan bahwa arah dominasi pelanggaran maksim sangat bergantung pada tema dan kompleksitas isu yang diusung tiap konten hoaks, bukan pola tunggal yang berlaku universal.

Temuan ini juga memperluas cakupan kajian linguistik forensik yang sebelumnya lebih banyak difokuskan pada tindak tutur pencemaran nama baik dan ujaran kebencian (Halid, 2022; Utami dkk., 2024; Djelema dkk., 2025) maupun ciri-ciri leksikal dan sintaksis hoaks (Putri dkk., 2025). Jika penelitian-penelitian tersebut menyoroti penanda kebohongan pada level kata dan struktur kalimat, penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran prinsip kerja sama dapat menjadi indikator yang lebih sistematis untuk memetakan *bagaimana* sebuah narasi hoaks disusun secara bertahap mulai dari manipulasi jumlah informasi, penguatan klaim tanpa bukti, hingga penautan isu yang tidak relevan dan penyampaian yang ambigu secara emosional. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa prinsip kerja sama Grice bukan hanya alat untuk mengidentifikasi ada-tidaknya kebohongan dalam suatu tuturan, melainkan juga dapat digunakan untuk memetakan pola dan hierarki strategi manipulasi yang menjadi

karakteristik konten hoaks di ruang digital, sekaligus memberikan pijakan bagi pengembangan model deteksi hoaks berbasis penanda pragmatik serta bahan literasi digital bagi masyarakat dalam mengenali pola bahasa yang berpotensi manipulatif.

4. SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap tiga kasus hoaks di situs web Komdigi (edisi 8 Mei 2026) terkait Vaksin TBC, Tarif Selat Malaka, dan video manipulasi Donald Trump dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap empat maksim prinsip kerja sama Grice merupakan strategi kebahasaan yang disengaja (*intentional linguistic strategy*) untuk memanipulasi informasi. Secara horizontal, konten hoaks pertama menunjukkan jumlah pelanggaran tertinggi dibandingkan dua konten lainnya. Secara vertikal, maksim kuantitas merupakan maksim yang paling sering dilanggar di antara keempat maksim yang dikaji.

Pelaku hoaks secara konsisten melanggar maksim kuantitas dan kualitas dengan cara melebih-lebihkan detail provokatif atau menyembunyikan konteks esensial, serta menyebarkan klaim fiktif tanpa bukti empiris. Sementara itu, pelanggaran maksim relevansi dan cara dilakukan melalui lompatan logika yang tidak koheren serta penggunaan bahasa yang ambigu atau metaforis. Dari perspektif linguistik forensik, pola pelanggaran pragmatik ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan berfungsi sebagai instrumen manipulasi psikologis untuk mengeksploitasi emosi audiens, membangun kredibilitas palsu dengan mencatut tokoh/lembaga terkenal, dan menggiring opini publik tanpa dasar fakta yang dapat diverifikasi.

Urgensi dari penelitian ini penting bagi pembaca karena menunjukkan bahwa bahasa dalam ekosistem hoaks telah bergeser fungsi dari alat komunikasi kooperatif menjadi alat propaganda digital yang terstruktur. Sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, perlu diarahkan pada analisis multimodal yang mengintegrasikan teks dengan rekayasa visual berbasis AI (*deepfake*) untuk membedah hoaks yang kian persuasif. Selain itu, diperlukan kajian komparatif lintas platform (seperti TikTok dan Facebook) serta pengembangan linguistik forensik komputasional guna menciptakan algoritma deteksi hoaks otomatis berbasis indikator pelanggaran maksim secara *real-time* demi mendukung kerja lembaga pengawas digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Affan, A. (2026). False realities: Hoaxes on the Palestine–Israel conflict in Indonesia's digital media. *Priviet Social Sciences Journal*, 6(4), 1–13. <https://doi.org/10.55942/pssj.v6i4.1431>
- Adelawati, M., & Arimi, S. (2025). Tindak tutur tidak literal pada pelanggaran UU ITE dalam kasus Lina Mukherjee: Analisis linguistik forensik. *Semantik*, 14(1), 113–126. <https://doi.org/10.22460/semantik.v14i1.p113-126>
- Arianto, A. K. (2021). Dugaan hoaks seputar vaksin COVID-19 di Indonesia dalam kerangka linguistik forensik. In *Prosiding Seminar Nasional: Arah Kebijakan Pendidikan dan Kajian Riset di Era New Normal* (Vol. 3, No. 1, pp. 115–129). Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

- Djelema, S., Abdullah, F. A., & Irawati, W. O., (2025). Linguistik forensik: Ujaran kebencian dalam kasus Yai Mim dan Sahara di Tiktok. *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, 1(2), 338-347.
- Fatahuddin, F., Iswary, E., & Saleh, F. (2024). Tindak tutur asertif pencemaran nama baik di sosial media. *Jurnal Idiomatik: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. <https://doi.org/10.46918/idiomatik.v5i1.1412>
- Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. In P. Cole & J. L. Morgan (Eds.), *Syntax and semantics: Vol. 3. Speech acts* (pp. 41–58). Academic Press.
- Halid, R. (2022). Tindak tutur pelaku pencemaran nama baik di media sosial kajian linguistik forensik. *KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, 5(2), 441–458. <https://doi.org/10.24176/kredo.v5i2.6342>
- Handayani, N., Amir, J., & Juanda. (2021). Kasus hoaks pandemi COVID-19: Suatu tinjauan linguistik forensik. *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 17(2), 169–177. <https://doi.org/10.25134/fon.v17i2.4432>
- Igwebuike, E. E., & Chimuanya, L. (2021). Legitimizing falsehood in social media discourse: A discourse analysis of political fake news. *Discourse & Communication*, 15(1), 42–58. <https://doi.org/10.1177/1750481320961659>
- Jannah, M., Munirah, M., & Munir, A. (2024). Tindak tutur pada berita acara pemeriksaan sebagai penegakan hukum yang setara dan berkeadilan (kajian linguistik forensik). *Jurnal Riset Guru Indonesia*, 3(1), 32–38. <https://doi.org/10.62388/jrgi.v3i1.401>
- Lewandowsky, S., & van der Linden, S. (2021). Countering misinformation and fake news through inoculation and prebunking. *European Review of Social Psychology*, 32(2), 348–384. <https://doi.org/10.1080/10463283.2021.1876983>
- Mahyoob, M., Algaraady, J., & Albloly, A. (2021). Linguistic-based detection of fake news in social media. *International Journal of English Linguistics*, 11(1). <https://doi.org/10.5539/ijel.v11n1p>
- Nasrullah, R. (2015). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Olsson, J. (2004). *Forensic linguistics: An introduction to language, crime and the law*. London: Continuum.
- Panjaitan, R. S., Hutabarat, G. E., Simaremare, T. T., Aprilia, M., Salwa, M., Puspitarini, H., & Gafari, M. O. F. (2026). Interpretasi pragmatik kontroversi kakek penjual es gabus dalam wacana digital. *Pragmatik: Jurnal Rumpun Ilmu Bahasa dan Pendidikan*, 4(2), 149–160. <https://doi.org/10.61132/pragmatik.v4i2.2615>
- Putri, A. Y., Sholikhah, H. A., Nuzula, K., Prasetyo, C. T., & Fikri. (2025). Ketakutan yang direkayasa: Analisis linguistik forensik atas hoaks "Petrus" dalam pesan WhatsApp. In *Prosiding SENALA: Seminar Nasional Linguistik Indonesia*, 75–83.
- Rahmawati, D., et al. (2021). Mapping disinformation during the Covid-19 in Indonesia: Qualitative content analysis. *Jurnal ASPIKOM*, 6(2). <https://doi.org/10.24329/aspikom.v6i2.907>
- Rohim, A., & Alimudin. (2026). Social communication and digital literacy strategies for preventing hoaxes in urban and semi-urban Indonesia. *Frontiers in Communication*. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2026.1816038>

- Sabrina, F., Alpris, Z., Aprilia, S., Sihite, Y., Syarifah, R., Puspitarini, H., & Gafari, M. O. F. (2026). Kegagalan felicity conditions dan pelanggaran maksim Grice dalam tuturan fitnah aparat: Studi kasus Sudrajat es gabus. *Mesada: Journal of Innovative Research*, 3(1), 147–155. <https://doi.org/10.61253/wfpmgm34>
- Sari, R. P., Boeriswati, E., & Anwar, M. (2025). Detecting hoax news on social media through pragmatic analysis. *Proceeding of International Seminar on Humanity, Education, and Language*, 1(1), 865–876. <https://doi.org/10.21009/ishel.v1i1.56469>
- Shabrina, S. N., Zamzani, & Setiawan, T. (2022). Analisis teks hoaks seputar informasi bank: Kajian bahasa perspektif analisis wacana kritis dan linguistik forensik. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 8(2), 492–507. <https://doi.org/10.22219/kembara.v8i2.21478>
- Sholihatin, E. (2019). *Linguistik forensik dan kejahatan berbahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subyantoro. (2017). *Linguistik forensik: Sebuah pengantar*. Semarang: CV Farishma Indonesia.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan aneka teknik analisis bahasa*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ubaidillah. (2024). Politik hoaks dan hoaks politik di Indonesia. *BRIN Publishing*. <https://doi.org/10.55981/brin.790>
- Utami, N. M. V., Jayantini, I. G. A. S. R., & Ariyaningsih, N. N. D. (2024). Pencemaran nama baik oleh Marissya Icha terhadap Medina Zein: Kajian linguistik forensik. In *Prosiding SENALISA: Seminar Nasional Linguistik dan Sastra*, 291–301.
- Yule, G. (1996). *Pragmatics*. Oxford University Press.